

# POLA KONSUMSI PANGAN POKOK DI BEBERAPA PROPINSI DI INDONESIA

Oleh:

Mewa Arifin dan Handewi P. Saliem<sup>1)</sup>

## ABSTRAK

Dengan menggunakan data Susenas disertai beberapa penyesuaian untuk menghitung konsumsi energi dari makanan jadi dan makanan lainnya, tulisan ini menelaah tentang pola konsumsi pangan pokok dan struktur pengeluaran pangan sumber karbohidrat di beberapa propinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras di daerah pedesaan secara umum relatif lebih tinggi daripada di perkotaan, demikian halnya untuk konsumsi jagung dan umbi-umbian. Tingkat konsumsi beras tertinggi di Jawa adalah Jawa Barat, sedangkan diluar Jawa adalah D.I Aceh (pedesaan) dan Nusa Tenggara Barat (perkotaan). Propinsi yang mempunyai pola konsumsi makanan pokok tunggal (beras) adalah DKI dan Aceh, sedangkan propinsi yang lain memiliki pola konsumsi makanan pokok yang berbeda yaitu beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu, yang masing-masing bervariasi urutannya berdasar besarnya sumbangan energinya. Sementara itu ditemukan pula bahwa pengeluaran untuk padi-padian merupakan proporsi terbesar diantara pengeluaran pangan yang lain. Kecukupan konsumsi energi rumah tangga sebagian besar bertumpu pada beras. Oleh sebab itu disarankan perlunya peningkatan penyuluhan gizi kepada rumah tangga agar konsumsi pangan sumber karbohidrat tidak tertumpu pada beras saja. Peningkatan konsumsi makanan selain beras tidak harus sebagai pangan pokok tetapi dapat berbentuk makanan selingan. Untuk itu perlu didukung oleh usaha peningkatan teknologi pengolahan pangan non beras.

## PENDAHULUAN

Masalah pangan dan gizi masih merupakan suatu masalah yang serius di sebagian besar negara berkembang. Karena itu setiap kebijaksanaan ekonomi selalu menempatkan masalah pangan dan gizi pada prioritas utama.

Di Indonesia, penanganan masalah pangan secara kuantitas relatif telah dapat diatasi dengan tercapainya swasembada beras di tahun 1984. Namun masalah kualitas serta distribusi pangan antar daerah/wilayah maupun masalah status gizinya masih memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi IV tahun 1988 antara lain menyimpulkan bahwa umumnya daerah-daerah Indonesia bagian Timur (kecuali Sulawesi) masih menghadapi masalah gizi yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Prevalensi Kurang Kalori Protein (KKP) anak balita di Indonesia bagian timur di atas 15 persen, sementara di bagian barat

sekitar 3,0 – 13,7 persen. Prevalensi gizi buruk di Indonesia bagian timur diatas 2,5 persen dan di bagian barat sekitar 0,4 – 1,9 persen.

Masalah lain yang cukup memerlukan perhatian adalah adanya kecenderungan terus meningkatnya konsumsi beras per kapita, sementara di lain pihak walaupun produksi beras juga meningkat namun laju pertumbuhannya cenderung menurun. Makin meningkatnya konsumsi beras tersebut antara lain disebabkan oleh (1) tersedianya beras dalam sistem pasar setempat dengan harga relatif murah, (2) peningkatan pendapatan atau daya beli penduduk, dan (3) adanya perubahan sistem nilai terhadap pangan pokok. Ada kecenderungan kuat, pemerataan konsumsi beras telah terjadi di semua wilayah propinsi termasuk wilayah dimana pendu-

---

<sup>1)</sup> Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

duknya semula mengkonsumsi pangan pokok bukan beras seperti di Maluku (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, 1989). Terjadinya kecenderungan peningkatan konsumsi beras dan perubahan pola konsumsi pangan pokok sangat menarik untuk dipelajari.

Secara spesifik tulisan ini ingin menelaah perkembangan konsumsi makanan pokok, pola makanan pokok dan struktur pengeluaran sumber karbohidrat di berbagai propinsi di Indonesia.

## METODA PENELITIAN

Data yang dianalisis adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Pada tulisan ini data yang dianalisis meliputi Susenas tahun 1979, 1984 dan 1987.

Data yang dikumpulkan pada Susenas adalah data pengeluaran pangan untuk rumah tangga selama satu minggu terakhir dan meliputi data konsumsi pangan yang cukup lengkap tentang makanan yang dipersiapkan di rumah (prepared at home). Kemudian dari data pengeluaran pangan tersebut dikonversikan ke satuan energi dan protein berdasarkan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yang dipublikasi oleh Departemen Kesehatan. Namun demikian, untuk data makanan jadi dan makanan lainnya hanya digali nilai rupiahnya saja. Untuk memperhitungkan sumbangan energi dari kedua kelompok makanan tersebut, maka pada tulisan ini dilakukan "penyesuaian" seperti dalam laporan gizi (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1988). Adapun penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai berikut:

### 1. Makanan jadi

$$\text{Energi} : \frac{N_{mg}}{NT - N_{mg}} \times E \times 0,6$$

dimana:

- $N_{mg}$  = nilai total makanan jadi
- $NT$  = nilai total pengeluaran pangan tanpa tembakau + sirih
- $E$  = jumlah energi yang diperhitungkan dari kelompok yang ada kuantitasnya termasuk yang sudah disesuaikan dengan makanan lainnya
- 0,6 = konstanta untuk memperhitungkan nilai pelayanan yang terkandung dalam makanan jadi yang diasumsikan sebesar 40%

### 2. Makanan lainnya

$$\text{Energi} = \frac{n_i}{N_i} \times E_{ni}$$

dimana:

- $n_i$  = nilai makanan yang hanya ada rupiah saja dari kelompok makanan ke-i
- $N_i$  = nilai makanan yang ada perhitungan energi dari kelompok makanan ke-i
- $E_{ni}$  = jumlah energi dari kelompok makanan ke-i yang diperhitungkan jumlah energinya

Telaahan awal data Susenas setelah dilakukan penyesuaian memperlihatkan bahwa ada rumah tangga yang mengkonsumsi energi dibawah 200 Kkal maupun diatas 10.000 Kkal/kapita/hari. Secara fisiologis, orang yang mengkonsumsi dengan tingkat konsumsi seperti tersebut tidak akan bertahan hidup karena kelaparan atau kekenyangan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendekatan aspek gizi yaitu dengan menyisihkan rumah tangga contoh yang mengkonsumsi energi diluar selang 1000 – 4500 Kkal/kapita/hari. Setelah dilakukan penyesuaian seperti tersebut di atas, jumlah rumah tangga untuk setiap propinsi dapat dilihat pada Tabel lampiran 1.

Berdasarkan pembatasan contoh tersebut, kemudian dihitung tingkat konsumsi rumah tangga untuk makanan pokok (beras, jagung, dan umbi-umbian), pengeluaran makanan pokok dan pola makanan pokok. Dalam kajian pola konsumsi makanan pokok, didasarkan pada sumbangan energi setiap pangan pokok terhadap total energi asal pangan pokok dengan patokan seperti yang dikemukakan dalam laporan gizi (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989), yaitu:

1. Pola pangan A, bila kontribusi pangan pokok A > 90%
2. Pola pangan A + B, bila kontribusi pangan pokok A > B dan B > 10%.
3. Pola pangan A + B + C, bila kontribusi pangan pokok A > B > C dan C > 5% dan seterusnya.

## TINGKAT KONSUMSI PANGAN POKOK

Dalam tulisan ini yang dimaksud pangan pokok adalah pangan sumber karbohidrat yang terdiri dari beras, jagung, umbi-umbian, dan untuk propinsi Maluku ditambah pisang. Pada pembahasan, pa-

ngan pokok dibedakan untuk beras, jagung dan umbi-umbian serta dibedakan antar daerah perkotaan dan pedesaan, keragaannya dapat dilihat pada Tabel 1, 2 dan 3.

Beras merupakan salah satu pangan pokok yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini tampak dari besarnya konsumsi beras untuk semua propinsi baik penduduk yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Pada tahun 1979, rata-rata konsumsi beras rumah tangga di Indonesia sudah diatas 120 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras tertinggi untuk daerah perkotaan adalah DKI Jakarta yaitu 171,4 kg/kapita/tahun, sedangkan untuk konsumsi terendah adalah Maluku (97,4 kg/kapita/tahun). Sementara itu untuk daerah pedesaan, konsumsi beras tertinggi di D.I Aceh yaitu 182,8 kg/kapita/tahun dan terendah juga di Maluku (51,1 kg/kapita/tahun).

Bila dibandingkan antara Jawa dan luar Jawa, tampak secara umum tingkat konsumsi beras di luar Jawa lebih tinggi daripada di Pulau Jawa, walaupun tingkat konsumsi tertinggi di DKI. Sementara itu bila dilihat antar daerah perkotaan dan pedesaan, maka konsumsi beras di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini diduga berkaitan dengan tingkat ketersediaan beras, dimana umumnya padi banyak ditanam oleh penduduk pedesaan. Dengan semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan, maka ada korelasi dengan tingkat konsumsi pangan rumah tangga. Tingginya konsumsi beras ini menuntut perhatian dari pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian, karena dengan semakin tinggi konsumsi beras maka tingkat ketersediaan beras di pasaran diharapkan juga meningkat. Untuk mendukung peningkatan ketersediaan beras dituntut upaya pembangunan pertanian terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan usahatani, seperti perbaikan saluran irigasi, penyediaan sarana produksi tepat waktu, jumlah dan mutu, serta kelancaran distribusi produk antar daerah. Peningkatan ketersediaan beras telah dilakukan melalui usaha intensifikasi (terutama lahan di Jawa), ekstensifikasi dan rehabilitasi masih tetap diperlukan. Selain itu konsumsi beras yang tinggi di pedesaan, salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan fisik seseorang. Penduduk di pedesaan umumnya bekerja di sektor-sektor yang memerlukan kegiatan fisik relatif berat, sehingga untuk mengimbangi kegiatan tersebut maka diperlukan konsumsi energi yang cukup tinggi. Pangan sumber energi yang mempunyai kandungan energi tinggi adalah beras.

Tinggi rendahnya konsumsi beras juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan yang mencakup jenis makanan pokok yang dikonsumsi, frekuensi makan dan suhu lingkungan dimana penduduk berada. Penduduk yang terbiasa dengan pola makanan pokok tunggal (beras) dan frekuensi makan yang tinggi, maka ada kemungkinan tingkat konsumsi beras akan tinggi pula. Untuk mengurangi konsumsi beras perlu diupayakan penggalakan diversifikasi konsumsi pangan pokok terutama untuk penduduk yang mengkonsumsi pangan pokok tunggal (beras). Sementara itu bagi penduduk yang terbiasa mengkonsumsi pangan pokok bukan beras, agar tetap dipertahankan.

Dari Tabel 1, tingkat konsumsi beras tahun 1979 di propinsi Maluku baik di perkotaan maupun di pedesaan paling rendah dibandingkan dengan propinsi lainnya. Hal ini diduga rendahnya tingkat konsumsi beras ada kaitannya dengan kebiasaan makan penduduk setempat yaitu mereka mengkonsumsi pangan pokok campuran (bermacam-macam jenis pangan pokok). Tingkat konsumsi beras untuk propinsi NTB menduduki tempat kedua teratas setelah D.I Aceh untuk luar Jawa dan melebihi propinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai gudang beras. Keadaan ini antara lain karena keberhasilan peningkatan produksi padi dengan sistem gogo rancah (gora), sehingga NTB dikenal dengan "Bumi Gora" nya.

Bila dilihat antar tahun, maka secara umum tingkat konsumsi beras rumah tangga sebagian besar propinsi menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Propinsi yang mengalami kenaikan konsumsi beras dari tahun 1979 ke tahun 1984 hanya dijumpai di pedesaan NTT. Sedangkan untuk tahun 1984 - 1987 di daerah perkotaan peningkatan konsumsi beras terjadi di propinsi Jawa Timur, D.I Aceh, Lampung, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Maluku dan Irian Jaya; dan untuk daerah pedesaan hanya di Jawa Tengah. Penurunan konsumsi beras ini dikaitkan dengan usaha memantapkan swasembada beras merupakan hal yang cukup menggembarakan. Karena dengan peningkatan konsumsi beras dari tahun ke tahun, akan menuntut usaha yang lebih keras dalam meningkatkan produksi beras, sedangkan di pihak lain terjadi penciutan lahan pertanian.

Penurunan konsumsi beras ini ada kaitannya dengan peningkatan pangan lain khususnya makanan jadi. Penduduk yang tinggal di perkotaan pada umumnya banyak yang melakukan pekerjaan diluar rumah, yang memungkinkan orang tersebut

Tabel 1. Konsumsi beras di beberapa propinsi di Indonesia, tahun 1979, 1984 dan 1987.

Propinsi	Konsumsi beras					
	1979		1984		1987	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
	----- kg/kapita/tahun -----					
<b>Jawa</b>						
1. DKI Jakarta	171,4	—	104,2	—	107,0	—
2. Jawa Barat	136,1	167,4	133,3	139,1	123,1	151,2
3. Jawa Tengah	122,2	105,0	118,5	103,8	106,8	109,3
4. Jawa Timur	113,5	89,9	96,0	86,0	102,0	92,4
5. DI Yogyakarta	134,4	102,2	101,5	86,1	97,0	96,2
<b>Luar Jawa</b>						
6. D.I Aceh	149,6	182,8	123,2	153,1	127,4	146,2
7. Sumatera Utara	149,7	180,7	122,4	131,5	118,7	150,6
8. Lampung	146,1	138,2	123,3	107,8	128,0	128,8
9. NTB	149,2	162,9	131,0	133,4	153,1	141,0
10. NTT	125,1	72,1	118,1	114,6	130,8	96,7
11. Kalimantan Sel.	141,8	159,6	119,1	131,6	119,4	133,3
12. Sulawesi Selatan	143,6	148,6	133,5	131,4	126,1	144,8
13. Maluku	97,4	51,1	90,3	41,6	98,1	64,3
14. Irian Jaya	113,9	110,5	95,8	85,1	113,4	42,7

membeli makanan dalam bentuk makanan jadi. Dari data yang dipublikasi BPS (1989), menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan jadi di perkotaan tahun 1987 sebesar Rp.2583/kapita/bulan lebih tinggi daripada tahun 1984 (Rp.1987/kapita/bulan), demikian pula untuk daerah pedesaan pada tahun 1984 sebesar Rp.695/kapita/bulan menjadi Rp.1025/kapita/bulan pada tahun 1987.

Selain beras, komoditas jagung merupakan pangan pokok yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk yang berpendapatan rendah. Jenis jagung yang banyak dikonsumsi adalah jagung basah dengan kulit, jagung kering dengan kulit, jagung pipilan dan tepung jagung. Untuk daerah perkotaan, pada umumnya penduduk mengkonsumsi jagung bukan untuk makanan pokok tetapi sebagai makanan selingan yang dikonsumsi langsung seperti jagung rebus, jagung bakar atau dikonsumsi secara tidak langsung (diolah dahulu) seperti kue-kue, bubur.

Oleh karena itu adalah wajar bila terlihat tingkat konsumsi jagung untuk daerah perkotaan jauh lebih rendah daripada daerah pedesaan. Keadaan ini berlaku untuk rumah tangga di Jawa dan luar Jawa (Tabel 2). Di Pulau Jawa, konsumsi jagung yang cukup tinggi untuk perkotaan dijumpai di D.I Yogyakarta (5,6 kg/kapita/th), sedangkan untuk daerah pedesaan selain D.I Yogyakarta juga di Jawa Tengah yaitu masing-masing 36,8 dan 33,6 kg/kapita/tahun.

Sementara itu, tingkat konsumsi jagung untuk luar Jawa tertinggi dijumpai di propinsi NTT baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan yaitu masing-masing sebesar 31,5 kg dan 99,7 kg/kapita/tahun. Keadaan ini diduga pada tahun tersebut, tingkat kerawanan pangan di propinsi tersebut cukup tinggi, mengingat lahan di sebagian besar propinsi NTT berupa lahan kering, yang tentu saja kurang produktif untuk tanaman padi. Selain kualitas lahan, NTT dikenal sebagai propinsi yang mempunyai curah hujan rendah dan tidak menentu (sulit diramal). Rata-rata curah hujan adalah 200 – 1000 mm per tahun, kecuali di daerah Flores bagian Barat (Erwidodo, dkk., 1991). Sehubungan dengan kondisi curah hujan tersebut, maka usaha pertanian tanaman semusim umumnya hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun yaitu saat musim hujan. Bila dibandingkan antar tahun, tampak terjadi penurunan konsumsi jagung yang cukup drastis di NTT. Hal ini diduga karena adanya peralihan konsumsi jagung ke beras. Dari Tabel 1 terlihat konsumsi beras tahun 1987 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini memberikan indikasi terjadinya pergeseran pada makanan pokok di NTT, dalam hal ini dari jagung ke beras.

Tingkat konsumsi jagung di Sulawesi Selatan menduduki urutan kedua setelah NTT untuk wilayah luar Jawa yaitu 7,1 kg/kapita/tahun daerah perkotaan dan 22,1 kg/kapita/tahun di pedesaannya.

Tabel 2. Konsumsi jagung di beberapa propinsi di Indonesia, tahun 1979, 1984, 1987.

Propinsi	Konsumsi jagung					
	1979		1984		1987	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
	----- kg/kapita/tahun -----					
<b>Jawa</b>						
1. DKI Jakarta	0,1	—	0,3	—	0,2	—
2. Jawa Barat	0,6	1,4	2,0	3,2	0,4	1,0
3. Jawa Tengah	2,2	33,6	16,9	31,9	1,0	17,2
4. Jawa Timur	0,1	6,3	0,8	12,2	2,6	31,0
5. DI Yogyakarta	5,6	36,8	15,7	42,0	0,2	5,6
<b>Luar Jawa</b>						
6. D.I Aceh	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
7. Sumatera Utara	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3
8. Lampung	1,3	6,8	3,9	24,1	0,9	6,2
9. NTB	0,9	11,5	7,4	16,4	1,0	5,6
10. NTT	31,5	99,7	9,1	10,8	0,1	0,4
11. Kalimantan Sel.	0,5	0,7	0,1	1,3	2,2	14,2
12. Sulawesi Selatan	7,1	22,1	0,8	26,1	1,1	3,1
13. Maluku	0,1	0,8	0,8	15,9	0,5	0,2
14. Irian Jaya	1,1	2,3	1,0	0,4	1,0	0,4

Bila dibandingkan antara tahun 1979 dan 1984, maka ada tujuh propinsi yang mengalami kenaikan untuk daerah perkotaan yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, NTB dan Maluku, sedangkan untuk daerah pedesaan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku. Namun demikian, kenaikan konsumsi jagung yang cukup tinggi hanya dijumpai di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Lampung dan Maluku. Peningkatan konsumsi jagung tertinggi di propinsi Jawa Tengah (perkotaan) yaitu hampir delapan kali lipat (konsumsi jagung tahun 1979: 2,2 kg dan 1984: 16,9 kg/kapita/tahun). Hal ini diduga ada kaitannya dengan tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Tengah (Tabel 1). Konsumsi beras untuk tahun 1987 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi beras penduduk perkotaan di Jawa Tengah tahun 1987 sebesar 106,8 kg/kapita/tahun lebih rendah daripada tahun 1984 (118,5 kg/kapita/tahun) dan tahun 1979 (112,2 kg/kapita/tahun). Penurunan konsumsi beras ini diimbangi dengan peningkatan konsumsi jagung. Jagung yang dikonsumsi ini diperkirakan bukan sebagai pangan pokok tetapi sebagai makanan selingan. Preferensi penduduk Jawa Tengah terhadap jagung ini tentu menggembarakan karena dapat menurunkan tingkat konsumsi beras.

Selama kurun waktu 1984, 1987, tingkat konsumsi jagung secara umum mengalami penurunan kecuali di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan (pedesaan). Seperti halnya pada beras, maka penurunan konsumsi jagung diduga ada kaitannya dengan semakin meningkatnya konsumsi makanan jadi atau pergeseran pola konsumsi makanan pokok.

Umbi-umbian merupakan salah satu pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk baik yang bertempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Yang termasuk umbi-umbian dalam tulisan ini adalah ketela pohon, ketela rambat, kentang dan talas. Umbi-umbian dapat dikonsumsi secara langsung sebagai makanan pokok atau makanan selingan seperti umbi-umbian yang direbus atau digoreng atau dapat juga harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi seperti dibuat kue-kue, roti.

Pada tahun 1979, rata-rata konsumsi umbi-umbian dari 14 propinsi untuk perkotaan sebesar 21,1 kg/kapita/tahun, dan untuk daerah pedesaan tiga kali lipat yaitu 65,5 kg/kapita/tahun. Bila diurutkan untuk lima propinsi yang mengkonsumsi umbi-umbian tertinggi di daerah perkotaan adalah Maluku, Jawa Tengah, NTT, Lampung dan DI Yogyakarta. Sedangkan untuk daerah pedesaan meliputi: Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, NTT, dan Jawa Barat. Berdasarkan tingkat kon-

Tabel 3. Konsumsi umbi-umbian\*) di beberapa propinsi di Indonesia, tahun 1979, 1984, 1987.

Propinsi	Konsumsi Umbi-umbian					
	1979		1984		1987	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
	----- kg/kapita/tahun -----					
<b>Jawa</b>						
1. DKI Jakarta	8,3	—	9,0	—	11,1	—
2. Jawa Barat	21,0	45,1	19,2	21,9	15,4	20,1
3. Jawa Tengah	31,4	87,0	29,7	43,4	19,5	48,0
4. Jawa Timur	18,0	167,7	23,5	61,2	14,4	35,7
5. DI Yogyakarta	21,4	119,5	32,5	39,7	12,0	43,3
<b>Luar Jawa</b>						
6. D.I Aceh	14,6	10,6	10,9	14,7	11,2	12,4
7. Sumatera Utara	21,1	39,0	7,2	32,9	13,6	44,7
8. Lampung	23,5	155,1	65,1	88,5	15,7	68,2
9. NTB	9,2	44,2	15,3	9,5	12,4	29,5
10. NTT	28,5	77,9	50,5	41,9	19,3	81,4
11. Kalimantan Sel.	11,7	18,4	11,2	31,9	11,1	17,0
12. Sulawesi Selatan	19,4	31,1	4,2	22,0	7,9	16,2
13. Maluku	54,3	25,8	62,7	68,8	36,6	115,1
14. Irian Jaya	12,7	30,7	36,5	58,3	59,7	255,6

\*) Yang termasuk umbi-umbian: ketela pohon + ketela rambat + kentang + talas.

sumsi jagung tersebut, maka tampak tingginya konsumsi jagung ada kaitannya dengan tingkat ketersediaan dan pola makanan pokok. Daerah-daerah yang mempunyai tingkat konsumsi jagung yang tinggi, umumnya merupakan sentra produsen palawija.

Selama kurun waktu tahun 1979–1984, sebagian besar rumah tangga di perkotaan mengkonsumsi jagung lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sebaliknya untuk tahun 1984–1987, rumah tangga di pedesaan yang banyak mengkonsumsi jagung lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi jagung tertinggi dijumpai di Irian Jaya, hampir lima kali lipat. Konsumsi jagung di pedesaan Irian Jaya tahun 1984 sebesar 58,3 kg menjadi 255,6 kg/kapita/tahun.

### POLA KONSUMSI PANGAN POKOK

Perubahan ketersediaan pangan suatu daerah, pada umumnya akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan pokok. Oleh sebab itu perubahan konsumsi pangan pokok ini sering digunakan sebagai indikator kerawanan konsumsi pangan. Pola konsumsi makanan pokok untuk ketiga belas propinsi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi propinsi menurut pola konsumsi makanan pokok, tahun 1979 dan 1984.

Pola makanan pokok	1979	1984
1. Beras	DKI, Aceh, Kalsel	DKI, Aceh
2. Beras + Jagung + Umbi-umbian	NTT	Jateng, Jatim
3. Beras + Umbi-umbian + Sagu + Pisang	Maluku	Maluku
4. Beras + Sagu + Umbi-umbian	Irian Jaya	—
5. Beras + Umbi-umbian + Sagu + Jagung	—	Irian Jaya
6. Beras + Jagung	—	NTB, Sulsel
7. Beras + Umbi-umbian	NTB, DIY, Sumut, Jabar Lampung	Kalsel, Sumut, Jabar
8. Beras + Umbi-umbian + Jagung	Jateng, Jatim Sulsel	Lampung, NTT, DIY

Sumber: Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989.

Dari tabel tersebut, tampak bahwa terdapat variasi pola konsumsi makanan pokok antar propinsi. Perbedaan ini wajar karena masing-masing propinsi mempunyai kondisi yang berbeda dalam hal sumberdaya alam, sosial, ekonomi bahkan pola

budayanya, yang pada gilirannya menentukan pola produksi dan konsumsi suatu wilayah. Hasil penelitian Mewa, A. dan T. Sudaryanto (1991) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pola pangan pokok berbeda untuk daerah agro ekosistem yang berbeda. Pada tahun 1979, propinsi yang mempunyai pola makanan pokok beras adalah DKI, Aceh dan Kalimantan Selatan, kemudian untuk tahun 1984 hanya Kalimantan Selatan yang bergeser menjadi pola makanan pokok campuran (beras + umbi-umbian).

Propinsi-propinsi yang tidak mengalami pergeseran pola konsumsi makanan pokok adalah DKI, Aceh, Maluku, Sumatera Utara dan Jawa Barat, sedangkan untuk propinsi yang lain mengalami perubahan tetapi untuk makanan pokok kedua dan seterusnya. Seperti untuk NTT, pola makanan pokok kedua adalah jagung pada tahun 1979 menjadi umbi-umbian untuk tahun 1984. Kedudukan NTT tersebut berbanding terbalik untuk Jawa tengah dan Jawa Timur. Pola konsumsi makanan pokok Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 1979: beras + umbi-umbian + jagung menjadi beras + jagung + umbi-umbian tahun 1984.

Di Irian Jaya, peranan sagu sebagai makanan pokok kedua bergeser menjadi makanan pokok ketiga dan digeser oleh umbi-umbian. Hal ini ada dua kemungkinan, pertama, terjadi pergeseran pola konsumsi karena selera yang bergeser, kedua, karena tingkat ketersediaan sagu yang berkurang sehingga sulit untuk dapat dikonsumsi. Untuk DI Yogyakarta dan Lampung, semula pola makanan pokok terdiri dari dua bahan pangan yaitu beras dan umbi-umbian, maka pada tahun 1984 mengalami penambahan yaitu jagung. Sementara itu di propinsi Maluku yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan makanan pokok sagu, ternyata sudah mulai bergeser ke arah beras.

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa beras merupakan makanan pokok yang utama untuk semua propinsi dan tampak propinsi yang semula mempunyai makanan pokok bukan beras telah beralih ke beras. Sementara itu selama kurun waktu 1979–1984 ada propinsi yang mengalami pergeseran pola makanan pokok terutama untuk makanan pokok kedua dan seterusnya. Keadaan ini diduga terutama dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan makanan pokok tersebut dibandingkan faktor selera. Karena faktor selera sulit untuk berubah dalam jangka waktu pendek, walaupun selera dapat berubah karena perubahan tempat, status sosial dan waktu. Tertumpunya pola

pangan pokok pada beras ini menuntut bahwa pelestarian swasembada beras merupakan salah satu upaya dalam pembangunan pertanian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

## PENGELUARAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT

Besar kecilnya pengeluaran pangan dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat tingkat konsumsi zat gizi walaupun tidak akurat. Karena semakin besar pengeluaran pangan belum tentu diikuti oleh peningkatan tingkat konsumsi zat gizi, apabila harga dari pangan tersebut mengalami kenaikan.

Data pada Tabel 5 memperlihatkan pengeluaran pangan untuk daerah Jawa lebih rendah daripada luar Jawa dan untuk pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Dari data tersebut juga terjadi kenaikan pengeluaran pangan selama tahun 1979–1984. Peningkatan dan perbedaan pengeluaran pangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan harga pangan tersebut. Pada umumnya harga pangan mengalami kenaikan terus menerus untuk setiap tahunnya dan harga pangan di luar Jawa umumnya relatif lebih mahal daripada di Jawa.

Pengeluaran pangan untuk di Jawa yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta (Rp.6553/kapita/bulan), dan selama kurun waktu 1979–1984, pe-

Tabel 5. Rata-rata pengeluaran pangan untuk beberapa propinsi, tahun 1979 dan 1984.

Propinsi	1979		1984	
	Kota	Desa	Kota	Desa
----- Rp/kapita/bulan -----				
<b>Jawa</b>				
1. DKI Jakarta	6553	—	13802	—
2. Jawa Barat	5559	4095	9639	9611
3. Jawa Tengah	5308	3149	7508	6962
4. Jawa Timur	5161	3246	6872	7142
5. DI Yogyakarta	4617	2994	7883	7247
<b>Luar Jawa</b>				
6. D.I Aceh	8396	7182	14272	14032
7. Sumatera Utara	5947	5274	12238	11982
8. Lampung	6969	4872	10740	8952
9. NTB	4601	3963	8458	7487
10. NTT	6030	4937	8346	9208
11. Kalimantan Sel.	6905	5354	12482	11683
12. Sulawesi Selatan	5299	4448	11101	10896
13. Maluku	7178	3147	13716	13652
14. Irian Jaya	7857	6670	21420	16029
INDONESIA	6557	5557	12226	11508

ningkatan di propinsi ini paling tinggi yaitu hampir dua kali lipat. Sementara itu, pengeluaran pangan tertinggi diluar Jawa untuk tahun 1979 di propinsi Aceh, sedangkan untuk tahun 1984 bergeser ke Irian Jaya. Pengeluaran pangan di Irian Jaya sebesar Rp.21.420/kapita/ bulan untuk perkotaan dan Rp.16.029/kapita/bulan untuk pedesaan. Pengeluaran pangan meliputi pengeluaran untuk padi-padian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, daging, ikan, susu dan lain-lain.

Pada Tabel 6 hanya disajikan pangan yang berkaitan dengan pangan pokok yaitu padi-padian dan umbi-umbian. Padi-padian meliputi padi dengan hasil olahannya, jagung dengan hasil olahannya dan terigu, sedangkan yang termasuk umbi-umbian adalah ketela pohon dan hasil olahannya, ketela rambat, kentang, talas dan sagu.

Sejalan dengan tingkat konsumsi beras dan jagung serta pola pangan pokoknya, maka proporsi pengeluaran untuk padi-padian menduduki porsi terbesar daripada kelompok pangan lainnya termasuk umbi-umbian. Rata-rata proporsi pengeluaran padi-padian untuk Indonesia adalah 32,9 persen (kota) dan 40,4 persen (pedesaan). Dari Tabel 6 tampak proporsi pengeluaran padi-padian untuk daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Bila dikaitkan dengan Tabel 1, maka besarnya pengeluaran padi-padian untuk daerah

pedesaan bukan disebabkan oleh tingkat konsumsi beras yang tinggi tetapi yang utama karena pengeluaran pangan untuk daerah pedesaan memang lebih rendah daripada di perkotaan.

Keadaan ini juga terjadi untuk tahun 1984, demikian pula untuk pengeluaran umbi-umbian di daerah pedesaan relatif lebih tinggi daripada di perkotaannya.

Proporsi padi-padian lebih tinggi daripada umbi-umbian, karena tingkat konsumsi beras dan jagung lebih tinggi daripada umbi-umbian dan jenis makanan pada padi-padian lebih banyak daripada jenis makanan pada umbi-umbian. Selain itu umumnya pola makanan pokok pertama dan kedua berasal dari padi-padian bukan dari umbi-umbian.

Bila data pada Tabel 5 dikaitkan dengan Tabel 6, maka tampak besarnya pengeluaran pangan belum tentu diikuti oleh tingginya pengeluaran pangan untuk padi-padian. Hal ini seperti terlihat di perkotaan irian Jaya tahun 1984, bahwa pengeluaran pangan untuk daerah tersebut tertinggi dibandingkan propinsi lain tetapi ternyata pengeluaran untuk padi-padian paling kecil yaitu 17,5 persen.

Pengeluaran umbi-umbian tahun 1984 tertinggi di propinsi Irian Jaya, baik untuk perkotaan maupun pedesaan dan umbi-umbian menjadi makanan pokok kedua setelah beras bagi penduduk setempat.

Tabel 6. Proporsi pengeluaran pangan sumber karbohidrat di beberapa propinsi di Indonesia, tahun 1979 dan 1984

Propinsi	1979				1984			
	Padi-padian		Umbi-umbian		Padi-padian		Umbi-umbian	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
<b>Jawa</b>								
1. DKI	36,0	—	0,6	—	27,3	—	1,5	—
2. Jabar	36,0	53,4	1,9	2,3	40,7	41,0	1,5	2,0
3. Jateng	35,1	49,8	1,6	3,8	41,8	39,3	1,6	2,6
4. DIY	38,2	46,8	1,4	4,9	37,1	32,9	1,6	2,9
5. Jatim	34,5	43,8	1,2	6,6	39,6	36,6	2,0	2,5
<b>Luar Jawa</b>								
6. Aceh	27,5	34,7	1,8	1,3	30,2	34,1	1,2	1,7
7. Sumut	37,2	48,2	1,4	2,0	38,0	39,3	0,6	2,4
8. Lampung	34,7	43,1	2,0	4,7	41,4	43,2	2,2	3,5
9. NTB	45,8	54,1	0,9	2,5	47,8	56,7	1,4	0,8
10. NTT	35,5	37,9	2,5	4,2	50,0	42,4	2,6	2,3
11. Kalsel	33,1	44,9	0,9	1,2	32,9	36,5	0,8	2,3
12. Sulsel	37,1	44,3	1,5	2,8	36,7	36,2	0,4	2,1
13. Maluku	22,1	17,6	4,5	20,9	28,6	22,4	5,3	12,2
14. Irija	17,0	20,0	3,3	3,4	17,5	21,0	6,0	16,1
Indonesia	32,9	40,4	2,1	4,3	35,2	36,2	2,0	3,6



## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat konsumsi beras di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan serta selama kurun waktu 1979 – 1984 telah mengalami penurunan konsumsi beras. Konsumsi beras tertinggi rata-rata pulau Jawa adalah Jawa Barat (123 – 151 kg/kapita/tahun) sedangkan untuk luar Jawa adalah NTB untuk perkotaan (133 kg/pakita/tahun) dan D.I Aceh untuk pedesaan (146 kg/kapita/tahun).
2. Tingkat konsumsi jagung dan umbi-umbian di daerah perkotaan lebih rendah daripada di pedesaan. Selama kurun waktu 1979 – 1987, konsumsi jagung dan umbi-umbian mengalami penurunan. Penurunan konsumsi ini tidak berarti harus diikuti dengan pengurangan penanaman jagung dan umbi-umbian, karena komoditas tersebut masih banyak diperlukan untuk pakan ternak dan industri pangan atau non pangan.
3. Proporsi pengeluaran untuk padi-padian paling tinggi diantara jenis pengeluaran makanan sumber karbohidrat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan konsumsi energi didominasi dari padi-padian, karena padi-padian merupakan sumber energi utama.
4. Pola makanan pokok dari ke-14 propinsi tersebut adalah beras, sedangkan untuk makanan pokok kedua atau ketiga bervariasi untuk setiap propinsi. Selama kurun waktu 1979 – 1984, ada beberapa propinsi yang mengalami pergeseran pola makanan pokok terutama untuk pangan pokok kedua (jagung, umbi-umbian) dan seterusnya. Hal ini diduga karena adanya pergeseran tingkat ketersediaan pangan tersebut, perubahan selera dan pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan perlunya peningkatan penyuluhan gizi agar konsumsi pangan sumber karbohidrat terdiversifikasi dan tidak tertumpu pada beras saja. Pengurangan konsumsi beras atau peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain tidak hanya berupa pangan dalam bentuk pangan pokok, tetapi bisa berbentuk sebagai makanan selingan berupa makanan jajanan. Untuk menangani hal tersebut, peningkatan teknologi pengolahan untuk pangan non beras perlu segera mendapat perhatian yang lebih serius.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. dan T. Sudaryanto. 1991. Pola Konsumsi Makanan Pokok, Konsumsi Energi dan Protein di Pedesaan Jawa Tengah *Dalam* Berita Pergizi-Pangan Vol. 7 No. 1. Diterbitkan oleh Pergizi-Pangan Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1989. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1987. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Erwidodo; P.U. Hadi; M. Arifin, E. Jamal. dan Tri B. 1991. Penelitian Pola Usaha Pertanian Lahan Kering di NTT dan NTB (Kelembagaan, Struktur Cost, Pasar, Infrastruktur Pola Usaha). Buku I, P/SE.
- Pusat Penelitian Agro Ekonomi. 1988. Profil Rumah Tangga dengan Konsumsi Kalori dan Protein di Bawah Kecukupan. Kerjasama, Departemen Kesehatan dengan Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Pusat Penelitian Agro Ekonomi. 1989. Pola Konsumsi Pangan, Proporsi dan Ciri-ciri RT Dengan Konsumsi Energi Dibawah Standar Kebutuhan. Kerjasama Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Binkesmas, Dep. Kesehatan dengan Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. 1989. LIPI.

Tabel lampiran 1. Jumlah rumah tangga contoh SUSENAS tahun 1979, 1984 dan 1987 di beberapa propinsi di Indonesia.

Propinsi	1979	1984	1987
<b>Jawa</b>			
1. DKI Jakarta	201	1946	1974
2. Jawa Barat	2871	4592	4744
3. Jawa Tengah	3055	4326	2585
4. Jawa Timur	1076	1583	5235
5. D.I Yogyakarta	3938	4871	1575
<b>Luar Jawa</b>			
6. D.I Aceh	592	1483	1609
7. Sumatera Utara	1375	2115	2261
8. Lampung	626	1588	1792
9. NTB	892	1901	1605
10. NTT	739	1634	5396
11. Kalimantan Selatan	605	1436	1517
12. Sulawesi Selatan	1662	1955	624
13. Maluku	193	441	565
14. Irian Jaya	226	510	1322
<b>Total</b>	<b>18051</b>	<b>30381</b>	<b>32804</b>